



JURNAL KAJIAN KEPENDIDIKAN ISLAM
<http://ejournal.iain-surakarta.ac.id/at-tarbawi>

RESPONS DAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP MADRASAH TERAKREDITASI A

*Mawwi Khusni Albar**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: mawwikhusni@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

Keywords:

Community response,
Madrasah, Management

Public interest in sending their children to an educational institution, one of which is determined by the quality of the educational institution. One of these qualities can be seen from the accreditation obtained. This study aims to determine the public's response to the A accreditation obtained by Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU 01 Cilopadang, Majenang District, Cilacap Regency in 2018. This educational institution has received an A accreditation since 2015. The study uses a descriptive-qualitative method, and included in field research or field research. In obtaining the data, the instruments that the researcher uses are interviews, observations, and studies of related documents. The analysis is done by reducing the data, displaying the data, and drawing conclusions. In clarifying the validity of the data, the researchers carried out an extension of participation, and triangulation of sources and methods. From the research conducted, it can be seen that the level of public knowledge of the quality of accreditation of MI Ma'arif NU 1 Cilopadang is high with an average of 98.43% of respondents knowing well the quality of accreditation. The attitude of the community towards the quality of MI Ma'arif NU 1 Cilopadang Majenang accreditation is high, based on the instrument in the context of this attitude, the average result is 94.56%. the quality of accreditation has a very high significant impact where the results obtained are 89.64% of the public are interested in choosing MI Ma'arif NU 1 Cilopadang based on the results of the accreditation obtained.

Abstrak

Kata kunci:

Respon masyarakat,
Madrasah, Manajemen

Minat masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di suatu lembaga pendidikan, salah satunya ditentukan oleh kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Kualitas ini salah satunya dapat dilihat dari akreditasi yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap akreditasi A yang diperoleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU 01 Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tahun 2018. Lembaga Pendidikan ini telah mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2015. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*. Dalam memperoleh data,

instrumen yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan studi atas dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Di dalam mengklarifikasi keabsahan data, peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi sumber maupun metode. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang termasuk tinggi dengan rata-rata 98,43% responden mengetahui dengan baik kualitas akreditasi. Sikap masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang Majenang termasuk tinggi, berdasarkan instrumen dalam konteks sikap ini didapatkan hasil rata-rata sebesar 94.56%. kualitas akreditasi memiliki dampak signifikan yang sangat tinggi dimana diperoleh hasil sebesar 89,64% masyarakat memilih MI Ma'arif NU 1 Cilopadang berbasis pada hasil akreditasi yang diperoleh.

PENDAHULUAN

Madrasah di akhir abad 20 ini telah menjadi lembaga pendidikan yang digandrungi oleh orang tua sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya (Yuniarsih, 2020). Di beberapa daerah bahkan jumlah madrasah dari tahun ke tahun meningkat cukup tajam (Hadi, 2016). Bila dilihat dari awal pertumbuhannya madrasah dimotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yang mengkondisikan madrasah itu tumbuh dengan dimotori oleh perseorangan atau lembaga swasta tertentu (Nata, 2001)

Meskipun sudah ditetapkan Undang-Undang otonomi daerah, namun madrasah dalam pengelolaannya masih terpusat (Rifa'i, 2017). Madrasah belum memperoleh dana dari pemerintah daerah seperti halnya pendidikan pada umumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih diskriminatif terhadap pendidikan madrasah setelah ada pengakuan bersama dalam SKB 3 Menteri tahun 1975 dan UUSPN No. 2 tahun 1989. Atas dasar itu, kebijakan di bidang pendidikan perlu dipertimbangkan secara mendalam untuk menentukan arah kebijakan pendidikan madrasah, apakah tetap dikelola pemerintah pusat atau diserahkan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Madrasah yang pada awalnya dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini di satu sisi mengalami pengayaan peran dan fungsi. Di sini madrasah boleh mengklaim sebagai "sekolah umum plus", sementara di sisi lain, karena tuntutan untuk memperkaya peran dan fungsinya madrasah mendapat beban tambahan yang cukup berat karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, madrasah juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini diajarkan (Azra, 2002).

Apabila madrasah dikelola dengan sistem manajemen profesional, mampu memahami dan merespon tuntutan serta aspirasi masyarakat, maka lembaga tersebut akan memperoleh peluang yang lebih besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi masyarakat. Manajemen pendidikan diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi manusia seutuhnya (Nafis, 2012).

Respon masyarakat merupakan efek komunikasi dalam bentuk pernyataan yang bersifat kontroversial dari sejumlah orang sebagai pengekspresian sikap terhadap masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum (Nafis, 2012). Hal ini dapat dilihat dari manajemennya yaitu bagaimana madrasah dapat mengelola sumber daya yang ada di dalamnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Hari ini upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di dibandingkan dengan Pendidikan umum memang perlu dilupayakan agar dapat menjawab respons tersebut. Animo masyarakat terhadap madrasah untuk kembali pada nilai-nilai agama begitu besar sehingga akan lebih mudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan agama (Alawiyah, 2014)

Mutu lulusan madrasah saat ini dituntut mampu mengamalkan ajaran agama dan menguasai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, pada kenyataannya juga belum sepenuhnya, masih banyak lulusan madrasah yang kurang sekali dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran agama, seperti shalat, tuntutan keterampilan lain juga masih kurang hampir dirata-rata madrasah (Zazin, 2011). Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.

Hasil akreditasi merupakan informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Masyarakat merupakan stakeholder utama dari satuan pendidikan, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu determinan pendidikan. Minat masyarakat menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas satuan pendidikan. Aspek-aspek sosial akreditasi madrasah menjadi urgen untuk diamati, termasuk tingkat respon dan partisipasi masyarakat terhadap madrasah yang terakreditasi.

Pelayanan pendidikan yang bermutu akan menentukan tinggi atau rendahnya perolehan hasil belajar siswa. Selain itu, hasil belajar siswa berkaitan dengan seberapa besar siswa memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Keinginan yang kuat serta keterlibatan aktif dalam proses belajar menunjukkan kadar atau kondisi motivasi belajar yang dimiliki siswa. Akreditasi dapat mendorong madrasah memenuhi akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan karena madrasah secara moral memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya mengenai pelaksanaan program pendidikannya. Akreditasi madrasah dapat menjadi ukuran keberhasilan atau tidaknya pengelola madrasah dan dimana letak kekurangan yang terjadi selama ini. Akreditasi madrasah dapat membantu pengelola madrasah untuk lebih fokus dalam tugas pengelola madrasah.

Telah banyak penelitian yang membahas terkait akreditasi suatu lembaga dan respons masyarakat terhadapnya. Diantara penelitian tersebut antara lain: *Pertama*, Amiruddin dengan artikelnya yang berjudul *Respon Masyarakat terhadap Madrasah Terakreditasi: Studi pada MTsN Tulehu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku* (Amiruddin, 2016). Artikelnya tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat respon masyarakat terhadap madrasah terakreditasi. Respon yang dimaksud terdiri atas pengetahuan (pemahaman), sikap (penilaian) dan partisipasi masyarakat selama ini berkaitan dengan madrasah terakreditasi dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa tingkat pengetahuan/pemahaman, dan sikap/penilaian masyarakat terhadap madrasah terakreditasi MTsN Tulehu terkategori "Tinggi", sedangkan tingkat partisipasi/ keterlibatan masyarakat terhadap madrasah terakreditasi terkategori "rendah".

Kedua, Hendarman dengan artikelnya yang berjudul *Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah* (Hendarman, 2013). Dalam artikelnya, Hendarman mengkaji efektivitas penyelenggaraan akreditasi pada sekolah/ madrasah dengan dua tujuan, yaitu (1) bagaimana hasil akreditasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan program, dan (2) bagaimana kredibilitas asesor dapat menjamin hasil akreditasi yang akurat dan akuntabel. Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kredibilitas asesor sekolah/ madrasah belum dinilai secara akurat dan akuntabel karena menggunakan instrumen yang kurang relevan.

Ketiga, Didin Asopwan dengan artikelnya yang berjudul *Studi tentang Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah* (Asopwan, 2019). Asopwan dalam artikelnya bertujuan untuk mengungkapkan gambaran aktual mengenai akredriasi sekolah terhadap peningkatan produktivitas Sekolah Menengah Kejuruan Lembaga Pendidikan Swadaya 1 Ciamis. Dari kajian yang dilakukannya dapat diketahui beberapa hal, diantaranya: (1) SMK LPS 1 Ciamis telah dapat melaksanakan persiapan, memenuhi instrumen penilaian akreditasi (8 SNP) dengan baik. (2) Wujud peningkatan produktivitas sekolah di SMK LPS 1 Ciamis terlihat dari kelengkapan dokumen dan administrasi sebagai intrumen penilaian akreditasi. Sarana prasarana sekolah sudah memadai, adanya peningkatan prestasi sekolah, dan peningkatan kinerja guru. (3) Tindak lanjut sekolah ketika visitasi berlangsung apabila ada temuan-temuan yang masih kurang lengkap kalau berhubungan dengan dokumen atau administrasi, dapat di proses dan dilengkapi langsung oleh tim, tetapi kalau berhubungan dengan sarana sekolah ada tenggang waktu untuk memperbaiki atau melengkapinya. (4) Dampak akreditasi terhadap sekolah dilihat dari bukti fisik berupa sarana prasarana yang memadai dan lengkap, kinerja guru terus meningkat, kepercayaan masyarakat dan pemerintah semakin tinggi.

Selain dari 3 (tiga) penelitian di atas, masih terdapat banyak penelitian sejenis. Berbeda tentang penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji respons masyarakat terhadap akreditasi A MI Ma'arif NU 01 Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tahun 2018. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji respons masyarakat terhadap akreditasi suatu lembaga, sedangkan perbedaannya adalah dari objek penelitiannya yang belum pernah di kaji oleh peneliti sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) (Nawawi, 1995). Peneliti melakukan riset pada suatu lembaga pendidikan formal dan melibatkan banyak sekali data yang bersifat lapangan (empiris). Selain itu, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang menggunakan manusia sebagai alat penelitian, bersifat deskriptif-eksploratif, membatasi studi dengan fokus permasalahan, dan hasil penelitian yang disepakati oleh pihak peneliti dan subyek penelitian (Soehadha, 2008).

Pendekatan kualitatif mengasumsikan bahwa manusia bersifat dinamis, aktif, kreatif, cair dan memiliki kemauan bebas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif bisa diperoleh data/informasi yang mendalam tentang subjek penelitian, baik yang bisa diamati oleh indera ataupun yang tersembunyi (yang tidak diamati oleh indera).

Lokasi utama penelitian ini adalah MI Ma'arif NU 01 Cilopadang Kecamatan Majenang terkait tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas Akreditasi MI Ma'arif Cilopadang, tingkat sikap masyarakat terhadap kualitas terakreditasi MI Ma'arif Cilopadang 01, dan minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MI Ma'arif Cilopadang 01. Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan data yang sifatnya literer, lokasi penelitian ini meliputi seluruh orang tua wali di Kelas I MI Ma'arif NU 01 Cilopadang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas Akreditasi MI Ma'arif 01 Cilopadang Majenang. 2) Mengetahui dan merumuskan konsep ideal dalam membangun mutu pendidikan dalam konteks hubungan dengan masyarakat dimana peran lembaga pendidikan sebagai tempat belajar masyarakat. 3) Mengetahui kontribusi penelitian ini bagi pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, khususnya bagi fakultas manajemen pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akreditasi Madrasah: Sebuah Telaah Epistemologis

Akreditasi merupakan sproses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Dalam pelaksanaannya asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi (Asmani, 2011). Akreditasi adalah bagian proses pendidikan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan tujuan untuk menilai, mengevaluasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan (Prihatin, 2011). Akreditasi dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara adil, obyektif, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada khalayak. Menurut Suharsimi Arikunto akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut (Arikunto, 1988).

Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Akreditasi Sekolah tahun 2003 pasal 1 ayat 3 adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah

yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Dengan demikian, peningkatan mutu sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu *human resources* secara nasional.

Dari beberapa definisi di atas peneliti, dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud akreditasi adalah sebuah pengakuan dan penilaian terhadap lembaga pendidikan tentang layak dan tidaknya kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Dalam buku pedoman akreditasi madrasah, akreditasi ditafsirkan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Jika proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi, hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan lembaga yang bersangkutan. Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan sekolah atau madrasah terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi 3 klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C) (Tim Penyusun, 2018)

Tujuan dari akreditasi Madrasah adalah adalah: *Pertama*, memperoleh gambaran kinerja madrasah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. *Kedua*, menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan (Tim Penyusun, 2018).

Berdasarkan Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah tujuan akreditasi adalah (Tim Penyusun, 2018):

1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP;
2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
3. memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan
4. memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas public.

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah tentunya akreditasi sekolah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut (Tim Penyusun, 2018):

1. Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*)

Dengan adanya akreditasi masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.

2. Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Setelah diadakannya akreditasi madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.

3. Pengembangan mutu (*Quality Improvement*)

Dengan adanya akreditasi madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

Setelah madrasah terakreditasi, maka diharapkan hasil akreditasi tersebut dapat bermanfaat sebagai (Tim Penyusun, 2018):

1. acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah;
2. umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah;
3. motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
4. bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta
5. acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.

Dari segi lingkup komponen lembaga pendidikan yang dinilai dalam akreditasi, meliputi penilaian proses belajar mengajar, sumber daya, manajemen, kultur dan lingkungan sekolah. Akreditasi mencakup delapan komponen yang termaktub dalam Standar Nasional Pendidikan, standar-standar tersebut adalah sebagai berikut (Nasyirwan, 2015):

Pertama, Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. *Kedua*, Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Ketiga, Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Keempat*, Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan (kualifikasi akademik dan kepemilikan sertifikat profesi) dan kelayakan fisik maupun mental, pendidikan dalam jabatan bagi guru dan tenaga kependidikan, serta jumlah dan/atau rasio guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, laboran, pustakawan, teknisi/petugas bengkel, dan petugas tata usaha).

Kelima, Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *Keenam*, Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Ketujuh, Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. *Kedelapan*, Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Tim Penyusun, 2018)

Untuk mengetahui respon dan dampak masyarakat terhadap madrasah terakreditasi A dalam hal ini di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, Majenang, penulis telah melakukan penggalian data yang berupa observasi dengan instrumen angket kepada responden yang berupa para orang tua wali murid MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Adapun indikator dari masyarakat yang digali dalam penelitian ini meliputi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, dalam hal ini terdapat tujuh poin yang menjadi indikator tingkat pengetahuan yaitu: layanan

pendidikan, kompetensi guru, dukungan tenaga kependidikan terhadap siswa, sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan sekolah, ekstrakurikuler, dan hasil UASBN.

Indikator kedua yang diukur dalam penelitian ini adalah tingkat sikap masyarakat tentang kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang yang meliputi lima poin yaitu: kelayakan madrasah dengan akreditasi A menjadi pilihan, rasa bangga masyarakat terhadap madrasah terakreditasi A, kesiapan masyarakat dalam membantu peningkatan kualitas madrasah, upaya mendukung peningkatan sarana dan prasarana madrasah, dorongan masyarakat terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Indikator terakhir yang digali dalam penelitian respon dan dampak masyarakat terhadap madrasah terakreditasi A dalam hal ini di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang adalah dampak akreditasi terhadap minat orang tua yang meliputi lima poin instrumen yang meliputi: akreditasi sebagai ukuran utama memilih sekolah, pengaruh akreditasi terhadap layanan pendidikan, tingkat kualitas akreditasi A, rasa bangga terhadap madrasah, akreditasi A sebagai alasan utama dalam memilih sekolah (Arikunto, 1988).

Untuk mengetahui data tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang penulis sajikan hasil rekap data yang digali melalui angket dengan skala likert, namun yang digunakan peneliti hanya 4 tingkatan yaitu : 1). SS: Sangat Setuju 2). S: Setuju 3). TS: Tidak Setuju 4). STS: Sangat Tidak Setuju. Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut : 1). SS: 4 2). S: 3 3). TS: 2 4). STS: 1.

B. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Kualitas Akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang

Dari hasil kuisioner menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap layanan madrasah terhadap masyarakat yang di berikan oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang cukup tinggi yang menyatakan menyatakan sangat setuju, yaitu sebanyak 22 orang atau 35% yang berpendapat demikian, sedangkan mayoritas masyarakat menyatakan setuju bahwa pelayanan yang diberikan oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang termasuk baik, dimana pendapat ini dinyatakan oleh mayoritas responden yang berjumlah 41 orang atau 65% dari total responden, sedangkan yang menyatakan pelayanan pendidikan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang tidak baik adalah tidak ada.

Ukuran tingkat pengetahuan masyarakat yang diukur selanjutnya adalah kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dalam mengajar peserta didiknya. Melalui angket yang

disebarkan didapatkan data bahwa 25 responden atau 40% sangat setuju bahwa kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang tergolong baik, sedangkan 38 responden atau 60% responden setuju bahwa kualitas guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang tergolong baik, adapun yang menyatakan kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang tidak baik adalah 0 (nol) atau tidak ada.

Kualitas kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang diakui oleh masyarakat memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan pelayanan pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang hal ini terlihat dari semua responden memberikan pengakuan yang kuat terhadap kualitas kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang yang diakui baik oleh masyarakat.

Dukungan tenaga kependidikan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dalam memberikan pelayanan tergolong signifikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Hal ini dapat dilihat dari 18 responden atau 29% responden yang mengakui dengan mantap dengan menyatakan sangat setuju terhadap dukungan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan, sedangkan 71% responden atau 45 responden dari jumlah keseluruhan responden yang setuju dengan dukungan tenaga kependidikan dalam pelayanan di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Kualitas dukungan tenaga kependidikan dalam pelayanan pendidikan di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang terkategori tinggi karena mendapat respon yang terbuka dari masyarakat umum sebesar 29% yang sangat setuju dan 71% yang setuju dengan kualitas pelayanan pendidikan yang baik di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dapat diketahui dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sarana dan prasarana MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Dari data yang terkumpul, diketahui bahwa 14% atau 9 responden menyatakan sangat setuju dengan kualitas sarana dan prasarana MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, sedangkan 54 responden atau 86% responden menyatakan setuju.

Pengakuan yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan terbuka rata-rata yang tinggi yang berupa 86% terhadap kualitas sarana dan prasarana diakibatkan karena MI Ma'arif NU 1 Cilopadang masih dalam tahap pengembangan, walaupun sudah tergolong lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Pada dasarnya yang terpenting dari sarana prasarana lembaga pendidikan bukanlah kemegahannya, tetapi optimalisasi fungsinya atau keberfungsian fisik lembaga

pendidikan tersebut (Bafadal, 2003). Itulah yang menjadi basis penilaian masyarakat pada sarana prasarana MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Tolok ukur selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang pengelolaan pembiayaan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Dari hasil angket yang didistribusikan kepada responden, didapatkan data bahwa 16 responden atau 25% responden menyatakan sangat setuju dengan baiknya pengelolaan keuangan madrasah, sedangkan 46 responden atau 73% menyatakan setuju akan baiknya pengelolaan keuangan, sedangkan 1 responden atau 2% responden menyatakan tidak setuju atau menyatakan pengelolaan keuangan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dalam kategori buruk.

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang tergolong tinggi dalam hal pengakuan, akan tetapi menyisakan satu responden yang menyatakan sebaliknya, hal ini disebabkan pengelolaan keuangan sebuah institusi memang tidak sepenuhnya bisa diakses oleh semua kalangan, oleh sebab itu penilaian semacam ini muncul. Selain itu responden dalam menilai baik buruknya pengelolaan keuangan juga bukan dengan perspektif yang holistik, tetapi parsial menggunakan satu tolok ukur saja, misalnya sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya.

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler MI Ma'arif NU 1 Cilopadang menjadi instrumen selanjutnya dalam mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Dari hasil penggalan data diperoleh data dengan 8 responden atau setara dengan 13% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 55 responden atau 83% responden menyatakan setuju dengan kualitas penyelenggaraan ekstra kurikuler di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, sedangkan yang menilai tidak baik adalah nol (0) atau tidak ada.

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang termasuk dalam kategori tinggi. Semua responden menyatakan mengakui bahwa kualitas penyelenggaraan ekstrakurikuler itu baik dan tidak ada yang menentang dengan menyatakan sebaliknya.

Instrumen terakhir dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang adalah respon masyarakat terhadap hasil UASBN. 11 responden atau 17% dari total responden menyatakan hasil UASBN MI Ma'arif NU 1 Cilopadang baik dan memuaskan dengan mengungkapkan sangat setuju dengan hasil UASBN, sebanyak 51 responden atau 81% responden menilai hasil

UASBN adalah baik dengan menyatakan setuju, sedangkan 1 orang responden atau 2% menyatakan tidak sependapat dengan penilaian mayoritas responden. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengakuan masyarakat mengenai kualitas lulusan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dalam kategori tinggi. Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat tersebut terkonfirmasi dengan respon yang tinggi berupa pengakuan hasil UASBN MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa semua instrumen dari layanan pendidikan, kompetensi guru, dukungan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan, pelaksanaan ekstrakurikuler, dan hasil UASBN MI Ma'arif NU 1 Cilopadang mengindikasikan bahwa respon masyarakat yang paling dominan adalah menilai baik terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, penilaian yang bersifat eksternal ini dinyatakan dengan terbuka dan dapat dikategorikan sebagai respon terbuka.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Kualitas Akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang

Dampak dan respon masyarakat terhadap madrasah berakreditasi A dalam konteks penelitian ini adalah MI Ma'arif NU 1 Cilopadang perlu diketahui sikap masyarakat terkait pilihannya terhadap madrasah dengan label akreditasi A, apakah mempengaruhi sikap masyarakat atau tidak. Berdasarkan penggalan data terhadap responden diperoleh data bahwa 34 responden atau 54% responden menyatakan madrasah terakreditasi A merupakan pilihan utama. 27 responden atau 43% responden yang menyatakan setuju bahwa madrasah dengan akreditasi A merupakan pilihan untuk menyekolahkan anak, sedangkan yang menyatakan sebaliknya hanya 2 responden atau 3% responden. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa madrasah dengan akreditasi A merupakan pertimbangan utama dalam memilih sekolah, atau dengan kata lain MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dipilih oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dimana faktor utama yang mempengaruhi pilihan tersebut adalah akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang yang sudah mendapatkan nilai A.

Faktor penentu sikap masyarakat terhadap madrasah dengan akreditasi selanjutnya adalah rasa bangga terhadap madrasah bersangkutan yang telah mendapatkan akreditasi A. Berdasarkan hasil angket yang didistribusikan, diperoleh data bahwa 30 responden

atau 48% responden menyatakan sangat setuju bahwa rasa bangga sangat menentukan pilihan terhadap pilihan sekolah, 32 responden atau 51% responden mendukung dengan menyatakan setuju, sedangkan 1 orang responden atau 2% responden menyatakan tidak setuju bahwa madrasah berakreditasi A dapat menimbulkan rasa bangga terhadap orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Dengan demikian, faktor rasa bangga ini merupakan faktor internal atau bersifat psikologis yang mempengaruhi sikap seseorang, walaupun bersifat subjektif (Santrock, 2010), akan tetapi dapat diambil generalisasinya bahwa perasaan akan suatu barang atau kondisi barang dalam hal ini sekolah terakreditasi A dapat menimbulkan rasa bangga yang kemudian mempengaruhi keputusan seseorang.

Kebersedian masyarakat menjadi tolok ukur selanjutnya terkait sikap masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Cilopadang yang notabene merupakan madrasah terakreditasi A. Dari hasil penggalan data di lapangan diperoleh hasil 15 responden atau 24% responden sangat bersedia dengan menyatakan sangat setuju, 46 responden atau 73% responden menyatakan bersedia berkontribusi dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas madrasah dengan menyatakan setuju, sedangkan 2 orang responden atau 3% responden menyatakan tidak bersedia menjadi bagian kemajuan madrasah.

Sikap masyarakat selanjutnya terhadap madrasah terakreditasi A yaitu MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dapat diukur dalam dukungan masyarakat terhadap pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Dari data yang didapat diketahui sebanyak 18 responden atau 29% responden menyatakan sangat setuju, 45 responden atau 71% responden menyatakan mendukung dengan mengungkapkan setuju, sedangkan responden yang menolak atau yang tidak setuju tidak ada.

Dukungan masyarakat yang sangat tinggi dalam pengadaan sarana dan prasarana MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi vertikal dan horizontal sekaligus dalam konteks partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Partisipasi vertikal masyarakat terjadi dalam kondisi dimana masyarakat ambil bagian dalam suatu program tertentu. Sedangkan peran horizontal dimana masyarakat tampil sebagai inisiator ditengah anggota masyarakat dalam partisipasinya terhadap peningkatan kualitas lembaga pendidikan (Effendi, 2002).

Sikap masyarakat terhadap madrasah terakreditasi dapat diukur dari dorongan masyarakat dalam peningkatan kualitas guru madrasah terakreditasi A. Dari hasil penggalan data didapatkan data bahwa 18 responden atau 29% responden sangat setuju untuk mendorong peningkatan kualitas guru, dan 45 responden atau 71% responden

menyatakan setuju dengan peningkatan kualitas guru, dan responden yang tidak setuju tidak ada.

D. Dampak Akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang terhadap Minat Orang Tua

Minat orang tua terhadap madrasah terakreditasi dalam penelitian ini adalah MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dapat didorong oleh alasan utama yang berupa akreditasi yang baik sebagai ukuran utama dalam menyekolahkan anak. Dari hasil penggalian data melalui angket didapatkan data sebanyak 21 responden menyatakan sangat setuju akreditasi merupakan ukuran utama dalam memilih sekolah bagi anak, 32 responden menyatakan setuju, sedangkan 9 responden menyatakan tidak setuju atau dalam artian akreditasi bukan merupakan ukuran utama dalam memilih sekolah bagi anak, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak setuju ukuran dalam memilih sekolah berdasar pada akreditasi. Ukuran utama dalam menilai mutu sekolah berdasarkan akreditasi merupakan pengejawantahan dari konsistensi tujuan, tanggung jawab, komitmen, budaya mutu, dan implementasi dari adopsi filosofi mutu total (Arcaro, 2005). Sehingga akreditasi layak menjadi ukuran mutu sebuah sekolah dan menjadi ukuran dalam memilih sekolah bagi anak.

Faktor pendukung minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang juga ditunjang oleh faktor akreditasi A terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah tersebut. Dari penggalian data mengenai hal tersebut didapatkan data 15 responden atau 24% responden sangat setuju adanya perbaikan pelayanan pendidikan, 43 responden atau 68% responden menyatakan setuju, sedangkan yang menolak hal tersebut dengan menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden atau 8% responden. Hal ini sesuai dengan fungsi akreditasi sendiri yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan layanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat, serta sesuai dengan tujuan akreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan pelayanan sekolah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya minat masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Cilopadang juga turut ditentukan oleh tingkat kualitas madrasah yang digambarkan dari akreditasi yang diperoleh. Dari hasil angket yang disebar diperoleh data 21 responden atau 33% responden menyatakan sangat setuju, 41 responden atau 65% responden menyatakan setuju, sedangkan 1 responden atau 2% responden berkeyakinan sebaliknya. Hal ini sesuai

dengan fungsi pengembangan yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Sehingga masyarakat yang menyekolahkan anaknya di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang menilai pelayanan pendidikan yang diberikan oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang sesuai dengan tingkat akreditasi yang didapat sehingga minat masyarakat ditentukan oleh tingkat akreditasi yang diperoleh oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Minat yang tinggi masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Cilopadang juga dapat dilihat dari besarnya rasa bangga akan hasil akreditasi A yang diperoleh oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Dari penggalan data diperoleh data sebanyak 25 responden atau 40% responden sangat setuju dengan rasa bangga yang dimiliki, 36 responden atau 57% responden menyatakan setuju dengan rasa bangga akan hasil akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, dan 2 orang responden atau 3% responden menyatakan tidak setuju. Untuk mendapatkan gambaran perhatikan grafik berikut.

Rasa bangga akan hasil akreditasi ini menentukan sikap masyarakat untuk mempertahankan capaian akreditasi yang diperoleh. Rasa bangga yang kemudian memicu peran serta masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya terhadap lembaga pendidikan yang berupa menjadi kontrol terhadap proses berjalannya pendidikan, dalam hal ini masyarakat menjadi parter-manajemen dalam mempertahankan mutu sekolah (Sudarwan, 2007).

Minat masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dapat diukur dari bagaimana orang tua memilih MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dengan alasan utama yang berupa hasil akreditasi yang di dapat. Dari hasil penggalan data didapat 17 responden atau responden 27% sangat setuju hasil akreditasi yang didapat oleh MI Ma'arif NU 1 Cilopadang menjadi alasan utama dalam menyekolahkan anaknya, 36 responden atau 57% responden setuju dengan akreditasi sebagai alasan utama dalam memilih sekolah, sedangkan 8 responden atau 13% menyatakan tidak setuju dan 2 responden atau 3% responden menyatakan sangat tidak setuju.

Mayoritas masyarakat nampaknya memiliki motif yang sama dalam memilih sekolah yaitu berbasis hasil akreditasi, akan tetapi ada sekitar 16% masyarakat yang belum sadar akan pentingnya akreditasi dalam sistem Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi ini, di mana SNP memiliki tujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Inilah yang menjadi tugas selanjutnya bagi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang untuk memberikan informasi yang merata kepada masyarakat akan pentingnya akreditasi

bagi sekolah dan peran masyarakat, sehingga kemajuan dan pengembangan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dengan sinergi masyarakat sebagai partner-manajemen akan dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan terhadap sikap dan respon masyarakat terhadap madrasah terakreditasi A dalam hal ini MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang termasuk tinggi dengan rata-rata 98,43% responden mengetahui dengan baik kualitas akreditasi yang terdiri dari tujuh komponen indikator yaitu, layanan pendidikan, kompetensi guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, dukungan tenaga kependidikan dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan dengan baik di MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, sarana prasarana, pengelolaan dan hasil dari prestasi non-akademis yang berupa ekstrakurikuler, dan prestasi akademik yang baik dari MI Ma'arif NU 1 Cilopadang yang berupa hasil UASBN yang tinggi.

Sikap masyarakat terhadap kualitas akreditasi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang Majenang termasuk tinggi, berdasarkan instrumen dalam konteks sikap ini didapatkan hasil rata-rata sebesar 94.56% sikap responden mau terlibat, berkontribusi, berperan, dalam kapasitas sebagai manajemen partner bagi MI Ma'arif NU 1 Cilopadang. Hal ini bisa dilihat dari lima komponen sikap antara lain: MI Ma'arif NU 1 Cilopadang dengan akreditasi A dinilai layak pilih oleh masyarakat, rasa bangga akan prestasi sekolah baik akademis maupun non akademis, peran aktif masyarakat dalam meningkatkan sarana prasarana, peran masyarakat dalam membantu peningkatan pelayanan sekolah, peran masyarakat dalam menginisiasi peningkatan kualitas guru MI Ma'arif NU 1 Cilopadang.

Pertanyaan penelitian ketiga yang harus dijawab adalah dampak madrasah terakreditasi A terhadap minat masyarakat menyekolahkan anaknya di MI Ma'arif 01Cilopadang. Berdasarkan hasil olah data dan analisis diketahui kualitas akreditasi memiliki dampak signifikan yang sangat tinggi dimana diperoleh hasil sebesar 89,64% masyarakat berminat memilih MI Ma'arif NU 1 Cilopadang berbasis pada hasil akreditasi yang diperoleh. Hal ini dapat diketahui dari lima indikator yaitu, akreditasi sebagai ukuran utama dalam memilih sekolah, pengaruh akreditasi terhadap layanan pendidikan, akreditasi A menunjukkan tingkat kualitas madrasah, rasa bangga memiliki anak bersekolah

di madrasah terakreditasi A, dan akreditasi A merupakan alasan utama dalam memilih sekolah.

Dari ketiga hasil analisis tersebut diperoleh pola peningkatan minat masyarakat terhadap MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, dimana MI Ma'arif NU 1 Cilopadang menerapkan empat langkah, *peertama*, pembentukan citra positif MI Ma'arif NU 1 Cilopadang ditengah kalangan masyarakat dengan masifikasi informasi tentang prestasi akademik maupun non akademik, kualitas tenaga pengajar dan dukungan tenaga kependidikan. *Kedua*, akademik maupun non-akademik yaitu hasil UASBN dan kegiatan ekstra kurikuler yang baik. *Ketiga*, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan memperoleh tingkat A dalam akreditasi. *Keempat*, dengan intensifikasi peran masyarakat, dimana masyarakat menjadi partner manajemen bagi pengembangan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang, dimana masyarakat bisa menjadi inisiator dan juga bisa berperan aktif dalam pengembangan MI Ma'arif NU 1 Cilopadang baik fisik maupun kualitas akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2014). Pendidikan Madrasah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449>
- Amiruddin, A. (2016). Respon Masyarakat terhadap Madrasah Terakreditasi Studi pada MTsN Tulehu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Al-Qalam*, 18(2), 217–226. <https://doi.org/10.31969/alq.v18i2.69>
- Arcaro, J. S. (2005). *Idikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1988). *Penelitian Program Pendidikan*. PT. Bina Aksara.
- Asmani, J. M. (2011). *Tips praktis membangun dan mengolah administrasi Sekolah* (1st ed.). Diva Press.
- Asopwan, D. (2019). Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(2), 265–272. <https://doi.org/10.4321/ijemar.v2i2.1922>
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Kompas.
- Bafadal, I. (2003). *Manajemen Pendidikan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Bumi Aksara.
- Effendi, I. (2002). *Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat Sumatera Utara*.

Universitas Sumatera Utara.

- Hadi, S. H. (2016). Dinamika Madrasah Dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Unggulan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 143–173.
- Hendarman. (2013). Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/ Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4).
- Nafis, A. S. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. LaksBang Presindo.
- Nasyirwan. (2015). Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9(6).
- Nata, A. (2001). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Grasindo.
- Nawawi, H. (1995). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (1st ed.). Gadjah Mada University Press.
- Prihatin, E. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan* (1st ed.). Alfabeta.
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99–114. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.31>
- Santrock, J. W. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Kencana.
- Soehadha, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Teras.
- Sudarwan, D. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. (2018). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2018*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Yuniarsih, N. (2020). *Penciptaan Citra Positif Madrasah dan Implikasinya terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Di Man 2 Brebes*. IAIN Purwokerto.
- Zazin, N. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.

Respons dan Minat Masyarakat Terhadap Madrasah Terakreditasi A
Mawi Khusni Albar